



**BUPATI LAMONGAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN**  
**NOMOR 93 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
5. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan/kegiatan dalam satu program.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk :

- a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja digunakan dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPD; dan
- b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III  
ANALISIS STANDAR BELANJA  
Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.
- (3) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

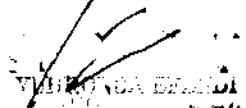
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 19 Desember 2016


**Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 19 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

**TAHUN 2016      NOMOR 93**

**BUPATI LAMONGAN,**  
  
**FADELI**

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk :

- a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja digunakan dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPD; dan
- b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

**Pasal 3**

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

**BAB III**  
**ANALISIS STANDAR BELANJA**  
**Pasal 4**

- (1) Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.
- (3) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 19 Desember 2016

**Diundangkan di Lamongan**  
**pada tanggal 19 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**LAMONGAN,**

**YOHANIS EFENDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

**TAHUN 2016 NOMOR 93**

**BUPATI LAMONGAN,**  
**FADELI**

**ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

---

## **I. PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat. Hal ini dapat diupayakan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien dimulai dari awal perencanaan, penganggaran sampai pada pelaporan keuangan daerah. Salah satu upaya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan penganggaran berbasis kinerja. Instrumen yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja salah satunya adalah dengan Analisa Standar Belanja (ASB).

ASB sudah dikenal jauh di pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut ASB dikenal dengan nama Standar Analisa Belanja (SAB) dimana merupakan sebuah instrumen untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Kemudian SAB kembali diperkenalkan dengan nama ASB dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan lebih teknisnya kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut pasal 157 diamanatkan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, memuat dokumen analisa standar belanja sebagai salah satu lampiran pendukung. Hal ini dimaknai bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja salah satunya didasarkan pada ASB, yang merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.

ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain :

- a. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya;
- b. Meminimalisasi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- e. Unit kerja mendapat keleluasan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Oleh karena itu, Studi Perhitungan Analisis Standar Belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 adalah hal yang harus dilaksanakan sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan, akuntabel dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Analisa Standar Belanja (ASB) berdasar pada teori salah satunya adalah teori *Activity Based Costing* (ABC). Teori ini lebih dahulu berkembang di sektor swasta sebelum akhirnya juga dikembangkan di sektor publik. *Activity Based Costing* menurut Horngren dan Foster (2003:39) merupakan "*An approach to costing that focuses on activities as the fundamental cost objects. It uses the costs these activities as the basis for assigning costs to other cost objects such as products, services or customer*".

Sementara itu menurut Mulyadi (2003:40), *Activity Based Costing systems* (ABC systems) adalah:

"Sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang".

Garrison dan Noreen (2003:316) mendefinisikan *Activity Based Costing* sebagai berikut: "*Activity Based Costing is a costing method that is designed to provide managers cost information for strategic and other decision that potentially affect capacity and therefore 'fixed' costs*".

Hansen dan Mowen (2003:122) mendefinisikan "*Activity Based Costing systems first trace cost to activities then to product....*".

Hilton, Maher, dan Selto (2006:14) memberikan pengertian *Activity Based Costing* sebagai berikut: "*Activity Based Costing or ABC is a costing method that first assigns costs to activities and then to goods services based on how much each good or service use the activities*".

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Activity Based Costing* di sektor swasta adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk, dimana aktivitas tersebut merupakan titik akumulasi biaya yang mendasar.

Perhitungan biaya di sektor swasta berdasarkan aktivitas ini didasarkan pada konsep produk yang mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Dengan metode ini diharapkan manajemen dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas-aktivitas



yang tidak bernilai tambah (aktivitas yang dipertimbangkan tidak memberi kontribusi terhadap nilai pelanggan atau terhadap kebutuhan organisasi).

### ***Teori ABC di Sektor Publik***

Terkait dengan sektor publik, teori ABC ini digunakan di pemerintah daerah dalam proses penganggaran yaitu ketika menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Tiap SKPD perlu menghitung setiap biaya pada masing-masing kegiatan dengan dasar alokasi yang berbeda untuk masing-masing kegiatan. Banyak pemerintah daerah yang belum mengadopsi metode ini dalam penghitungan anggaran belanjanya. Umumnya metode yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah pemerataan biaya secara umum untuk masing-masing unit. Padahal masing-masing unit tersebut pada kenyataannya tidak menggunakan sumber daya dalam jumlah yang sama.

Dalam *Activity-Based costing* ini menggunakan *cost driver* sebagai faktor yang dapat menjelaskan konsumsi biaya-biaya *overhead*. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktivitas-aktivitas selanjutnya.

### ***Cost Driver***

Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas adalah dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau *cost driver* untuk setiap aktivitas. Pemahaman yang tidak tepat atas pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan pada pengklasifikasian biaya, sehingga menimbulkan dampak bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

*Cost driver* merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya *overhead*. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktifitas.

Di sektor swasta, terdapat dua jenis *cost driver*, yaitu:

#### ***a. Cost Driver berdasarkan unit***

*Cost Driver* berdasarkan unit membebankan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif overhead tunggal oleh seluruh departemen.

b. *Cost Driver* berdasarkan non unit

*Cost Driver* berdasarkan non unit merupakan faktor-faktor penyebab selain unit yang menjelaskan konsumsi *overhead*. Contoh *cost driver* berdasarkan unit pada perusahaan jasa adalah luas lantai, jumlah pasien, jumlah kamar yang tersedia.

Dalam pemilihan *cost driver* yang tepat ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan:

- Kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemilihan *cost driver* (*cost of measurement*). *Cost driver* yang membutuhkan biaya pengukuran lebih rendah akan dipilih.
- Korelasi antara konsumsi aktivitas yang diterangkan oleh *cost driver* terpilih dengan konsumsi aktivitas sesungguhnya 20 (*degree of correlation*). *Cost driver* yang memiliki korelasi tinggi akan dipilih.
- Perilaku yang disebabkan oleh *cost driver* terpilih (*behavior effect*). *Cost driver* yang menyebabkan perilaku yang diinginkan yang akan dipilih.

### **Tahapan dalam *Activity Based Costing***

Tahapan dalam penerapan *Activity Based Costing* adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aktivitas atau kegiatan

Pengindentifikasian aktivitas atau kegiatan menghendaki adanya daftar jenis-jenis program yang terdapat dalam tiap SKPD.

2. Membebankan biaya ke aktivitas atau kegiatan

Setiap kali suatu aktivitas atau kegiatan ditetapkan, maka biaya pelaksanaan aktivitas tersebut ditentukan.

3. Menentukan *cost driver*

Langkah berikutnya adalah menentukan *cost driver* untuk masing-masing aktivitas yang merupakan faktor penyebab pengendali dari aktivitas-aktivitas tersebut.

4. Menentukan tarif

Dalam menentukan tarif ini, total biaya dari setiap aktivitas dibagi dengan total *cost driver* yang digunakan untuk aktivitas tersebut.

## 5. Membebankan biaya ke produk

Langkah selanjutnya adalah mengalikan tarif yang diperoleh untuk setiap aktivitas tersebut dengan *cost driver* yang dikonsumsi oleh tiap jenis objek belanja kemudian membaginya dengan jumlah output kegiatan.

### III. TAHAP Pengerjaan

Tahapan dalam penyusunan Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut:

#### 1. Kajian Pustaka

Proses dalam tahap Kajian Pustaka ini adalah studi literatur mengenai proses penghitungan standar analisis biaya berdasarkan metode statistika deskriptif. Beberapa teori dan metode statistika deskriptif dalam menentukan standar biaya akan dikaji berdasarkan asumsi yang mendasari dan teknik perhitungannya. Berdasarkan hasil kajian tersebut akan terlihat beberapa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing teknik statistika tersebut serta kemungkinannya untuk diaplikasikan.

Proses kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dalam penyusunan analisis ini. Satu metode yang diterapkan di suatu tempat belum tentu cocok untuk diterapkan di tempat yang lain. Hal ini tergantung dari berbagai kondisi yang ada di tempat tersebut, termasuk ketersediaan data dan kegiatan di setiap daerah.

Berikut adalah langkah-langkah teknis dalam melakukan kajian pustaka

- Menentukan metode analisis standar biaya yang ada
- Melakukan analisis keunggulan dan kelemahan dari masing-masing metode analisis tersebut
- Melakukan analisis kondisi lapangan di Kabupaten Lamongan
- Menentukan metode yang akan diterapkan dalam melakukan analisis ASB Pemerintah Kabupaten Lamongan

#### 2. Pengumpulan Data

Proses dalam tahapan ini adalah menginventarisir data seluruh kegiatan pada tahun 2010 sampai 2015 pada seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hal yang harus diperhatikan ialah memastikan bahwa data belanja dalam setiap kegiatan di tahun tersebut tersedia lengkap. Data belanja sebaiknya menggunakan data realisasi belanja, namun bila data tidak tersedia, maka digunakan data dalam APBD Perubahan.

### 3. Penggolongan Kelompok ASB

Data kegiatan dan belanja per SKPD masih merupakan data mentah yang harus dikelompokkan dan digolongkan berdasarkan kelompok belanja-belanja tertentu. Pengelompokan ini untuk mempermudah proses analisis ASB. Setiap kelompok ASB minimal terdiri dari 3 (tiga) sampel kegiatan. Semakin banyak sampel kegiatan yang digunakan dalam sebuah kelompok ASB akan semakin baik.

Pengelompokkan data dari seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan kelompok sampel kegiatan lintas SKPD. Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki 64 SKPD dan pengelompokan dilakukan dengan menggabungkan data sampel kegiatan yang serupa yang berasal dari 2 SKPD atau lebih. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan seluruh atau nyaris seluruh SKPD dimana cenderung kegiatan rutin ataupun kegiatan yang tidak melekat hanya pada SKPD tertentu. Pengelompokan ini sering disebut dengan ASB Umum.

Dasar pengelompokan belanja yang dilakukan adalah:

- Memiliki kesamaan sifat atau proses terjadinya belanja tersebut
- Memiliki *ouput* yang sama
- Memiliki unsur pemicu (*cost driver*) yang sama

Dalam penyusunan ASB kali ini, metode yang kami gunakan adalah menggunakan *student-t distribution*. Metode ini memungkinkan dalam penentuan nilai rata-rata, batas atas, dan batas bawah belanja yang diinginkan dari setiap kelompok ASB.

Berikut merupakan hasil inventarisasi data-data sampel kegiatan serupa dan sejenis yang sudah disusun berdasarkan kelompok ASB yang dikelompokkan per kegiatan pada lintas SKPD (ASB Umum) dalam hal ini adalah:

1. ASB Pelatihan dan Bimbingan Teknis
2. ASB Pelatihan dan Bimbingan Non Teknis
3. ASB Pembangunan Gedung Kantor
4. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. ASB Penyediaan Makan dan Minum
6. ASB Penyediaan ATK

Keseluruhan ASB umum ini kemudian dibuat inventarisasi kegiatan di 37 SKPD tahun 2010 sampai dengan 2015 dimana tidak memasukkan Kecamatan sebagai sampel dalam penentuan ASB ini.

## 1. ASB Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Dinas Perhubungan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Sosialisasi teknis pelaksanaan operasional Menara Telekomunikasi		
Kantor Lingkungan Hidup					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bimbingan Teknis dan Pelatihan	Bimbingan Teknis dan Pelatihan	Bimbingan Teknis dan Pelatihan	Bimbingan Teknis dan Pelatihan	Bimbingan Teknis dan Pelatihan	Bimbingan Teknis dan Pelatihan
			Bimbingan Teknis Persampahan		
BPPKB					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		
Dinsosnaker					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
<b>Dinas Kopindag</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
			Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan dan Pertanian/Crispi Ikan Lele dan Makanan Ringan Bagi Masyarakat di Wilayah Tembakau	Bimbingan Teknis Manajerial Keuangan Koperasi Wanita	
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Olahan Buah dan Pengemasannya	
<b>Satpol PP</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
			Pembekalan teknis operasional tenaga linmas	Pembekalan teknis operasional tenaga linmas	Pembekalan teknis operasional tenaga linmas

			Pembekalan teknis bagi anggota Trenggana	Pembekalan teknis bagi anggota Trenggana	Pembekalan teknis bagi anggota Trenggana
<b>BPBD</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
			Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana
<b>Sekretariat Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Bimbingan Teknis ke PPAT an	Bimbingan Teknis ke PPAT an	Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi Perusahaan Daerah	Bimbingan Teknis dan Tatacara Kerjasama BUMD	Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi BUMD	Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama Bagi Perusahaan Daerah
Bintek LAKIP		Bimbingan Teknis ke PPAT an	Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
			Bimbingan Teknis analisa kebutuhan, pengadaan, distribusi dan inventaris aset	Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ	Bimbingan Teknis Pelaporan Akuntansi Berbasis Akrual Bagi Pengguna Anggaran
			Bimbingan Teknis Mekanisme Pemotongan / pemungutan dan Penyetoran Pajak-	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD 2015	Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ

			Pajak Negara		
			Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD	Bimbingan Teknis ke Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) an	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD 2016
			Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis ke Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) an
			Bimbingan Teknis ke PPAT an	Pelatihan Teknis Dan pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
					Bimbingan Teknis Administrasi Kecamatan
					Bimbingan Teknis dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
					Bimbingan Teknis Petausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>



Pendidikan dan pelatihan teknis	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis Bimbingan Kepegawaian	Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis Bimbingan Kepegawaian
				Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pendidikan dan Pelatihan Teknis
<b>Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis dan masyarakat (Sistem Informasi pendayagunaan profil desa dan kelurahan)		Penyediaan Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat	
		Penyediaan Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan			
<b>Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan &amp; Asset (DPRKA)</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pelatihan Akuntansi untuk SKPD Baru dan monitoring Pertanggungjawaban Belanja SKPD					
<b>Dinas Pertanian &amp; Kehutanan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Pembinaan dan Bimbingan Teknis			Temu Teknis Penyuluh Pertanian di	Temu Teknis Penyuluh Pertanian di

	Budidaya Tembakau			Tingkat Kabupaten	Tingkat Kabupaten
<b>Dinas Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Pembinaan Teknis Pembudidayaan Itik			Pelatihan Teknis Pernakan	Pelatihan Teknis Pernakan
	Pembinaan Teknis Pembudidayaan Kambing				
<b>Badan Perpustakaan &amp; Arsip Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Pendidikan dan pelatihan informasi				
	Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta				
<b>Dinas Perikanan dan Kelautan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
				Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Olahan UKM Perikanan	

## 2. ASB Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis

Dinas Pendidikan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)		Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)		Pelatihan kompetensi tenaga kependidikan	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
		Pelatihan tutor program Kejar Paket B setara SMP		Pelatihan Tutor Keaksaraan	Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar
		Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan		Pelatihan tutor program Kejar Paket B setara SMP	Pendidikan dan Pelatihan Formal
		Penyelenggaraan Pendataan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun.		Seminar Sejarah Lamongan Purbakala	Pelatihan Tutor Program Keaksaraan Usaha Mandiri
		Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Liga Pendidikan Indonesia/LPI)		Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar	Pelatihan tutor program Kejar Paket B setara SMP
					Pendidikan dan Pelatihan Formal
					Pelatihan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar

					Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
<b>Dinas Kesehatan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Penyuluh pada Penanganan Penderita Akibat Rokok	Pelatihan Peningkatan Kemampuan tenaga jabatan fungsional (Jabfung) Puskesmas pada penanganan penderita akibat rokok	Pendidikan dan Pelatihan Formal Manajemen Puskesmas	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa thd Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas Pasung)
Pelatihan Penanganan terhadap Penyakit Pneumonia	Sosialisasi tentang Pencegahan penggunaan zat adektif termasuk rokok	Pelatihan Kelas Ibu Hamil	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa thd Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas Pasung)	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa thd Penanganan Kegawatdaruratan Psikiatrie (Bebas Pasung)	Pelatihan Kelas Ibu Hamil
Pelatihan Petugas Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Pengaruh Rokok	Workshop, seminar tentang Bahaya Rokok bagi Ibu dan Janin serta pemeriksaan Papsmear dan kanker payu dara (IVA)		Pelatihan Kelas Ibu Hamil	Pelatihan Kelas Ibu Hamil	Pendidikan dan Pelatihan Formal

Sosialisasi bahaya merokok kepada masyarakat			Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan	Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan	Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan
Sosialisasi tentang Pencegahan penggunaan zat adektif termasuk rokok				Sosialisasi Pendampingan Taman Posyandu	Sosialisasi Pendampingan Taman Posyandu
Workshop, seminar, lokakarya, simposium tentang bahaya rokok				Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Pekerja di Lingkungan kerja	Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Pekerja di Lingkungan kerja
Sosialisasi pemahaman pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya merokok kepada masyarakat khususnya pada pra usia lanjut dan usia lanjut					
Pelatihan Kesehatan Reproduksi Perempuan Bagi Kader Posyandu					
<b>RSUD Dr. Soegiri</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal					
Pendidikan dan Pelatihan Mahasiswa di Rumah Sakit					
Pelatihan Pengendalian Infeksi Nosokomial					
<b>RSUD Ngimbang</b>					

2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Pendidikan dan Pelatihan Formal		Pendidikan dan Pelatihan Formal	
<b>PU Bina Marga</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal
<b>PU Pengairan</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa	Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan rawa	Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan rawa	Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan rawa
<b>Karya Cipta</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran		
<b>Kantor Penelitian &amp; Pengembangan Daerah</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal
<b>Badan Kesatuan, Politik &amp; Perlindungan Masyarakat</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sosialisasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2010	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Sosialisasi dan Jaringan Komunikasi HAM			

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Sosialisasi dan Jaringan Komunikasi HAM				
Sosialisasi dan Jaringan Komunikasi HAM					
<b>Dinas Perhubungan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		
<b>Kantor Catatan Sipil</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Pelatihan tenaga Pengelola SIAK	Pelatihan tenaga Pengelola SIAK	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Pendidikan dan Pelatihan Formal
		Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Pelatihan tenaga Pengelola SIAK		Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
			Sosialisasi Kebijakan Kependudukan		Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
<b>BPPKB</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif		Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
		Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender	Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
		Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



		Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan		Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kota Layak Anak Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
				Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	
<b>Dinasnaker</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan bagi Anak Bermasalah	Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan bagi Anak Bermasalah	Pendidikan dan Ketrampilan Kerja Bagi Kelompok Kerja Masyarakat di Wilayah Tembakau	Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Pelatihan Transmigrasi Regional	Bimibingan Sosial bagi Eks Kusta	Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi anak bermasalah	Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi anak bermasalah
	Pendidikan dan Ketrampilan Kerja Bagi Kelompok Kerja Masyarakat di Wilayah Tembakau	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa	Pendidikan dan Ketrampilan Kerja Bagi Kelompok Kerja Masyarakat di Wilayah Tembakau (Cukai)	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu

	Pelatihan Ketrampilan Las Bagi Pencari Kerja	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan bagi TKI Purna	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
	Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Pelatihan Transmigrasi Regional	Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal di Wilayah Penghasil Tembakau ( Cukai)	Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja
	Pelatihan Transmigrasi Regional	Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Pelatihan Transmigrasi Regional	Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pelatihan Kerja
		Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu	Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja	Pelatihan Transmigrasi Regional
		Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan bagi Anak Bermasalah	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Sablon bagi Masyarakat di Wilayah Tembakau (Cukai)	Pelatihan Transmigrasi Regional	

		Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu		
		Sosialisasi Perundang-Undangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja			
<b>Dinas Kopindag</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Sosialisasi bahaya merokok bagi kesehatan dan kebijakan penyelenggaraan undang-undang perlindungan konsumen	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Sosialisasi UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Pelatihan Peningkatan Tenun dan Desain Industri Alas Kaki bagi pengrajin rokok	Sosialisasi penggunaan elpiji tabung ukuran 3 Kg/ Konversi minyak tanah	Pelatihan SDM Pengelola Koperasi	Pelatihan SDM Pengelola Koperasi	Sosialisasi penerapan SNI wajib, standar halal dan merek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / Koperasi Unit Desa (KUD)
Diklat Perkoperasian	Sosialisasi Pembangunan Pasar Tradisional Bagi Daerah Penghasil Tembakau	Pelatihan Peningkatan SDM dan penyediaan peralatan bagi IKM ukiran kayu bagi IKM rokok/masyarakt	Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk dan Kemasan Bagi IKM - IRT kripik sukun dan garut bagi Masyarakat di	Pembinaan dan Sosialisasi Pasar Tertib Ukur Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Pelatihan Pemanfaatan Bahan Limbah Kayu Bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Kerajinan Kayu di Wilayah Tembakau

		disekitar wilayah penghasil tembakau	wilayah tembakau		
	Sosialisasi manajemen mutu bagi IKM - IRT pengrajin rokok	Pelatihan Peningkatan SDM dan Penyediaan Peralatan IKM Pangan dan Kerajinan bagi Masyarakat di wilayah tembakau	Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian dan Desain Produk dan Kemasan bagi IKM-IRT Makanan - Minuman	Sosialisasi dan Relokasi Pedagang Pasar Sidoharjo	Pelatihan peningkatan Mutu Produk bagi Industri Kecil Menengah (IKM) tas Imitasi Bagi Masyarakat di Lingkungan Pabrik Rokok
	Sosialisasi sistem manajemen pemasaran dan promosi bagi produk IKM-IRT pengrajin rokok	Pelatihan Pembuatan Kurma Tomat dan Manisan Mangga bagi Masyarakat Penghasil Tembakau	Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi Anyaman Tikar Mendong di Wilayah Penghasil Tembakau	Sosialisasi Achivement Motivation Training (AMT) bagi IKM Se-Kabupaten Lamongan dan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Pelatihan Pengembangan Usaha Konveksi Berteknologi Bagi Masyarakat di Wilayah Tembakau
	Sosialisasi wajib uji tar dan nikotin	Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk dan Kemasan Bagi IKM - IRT Krupuk Sukun dan garut bagi Masyarakat di Wilayah Tembakau	Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk IKM-IRT Konveksi dan Desain Mode Busana Muslim Bagi Masyarakat di Wilayah Tembakau	Bimbingan Teknis Manajerial Keuangan Koperasi Wanita	Pelatihan Peningkatan Desain Bagi IKM Gerabah Gedangan

	Pelatihan ketrampilan pembuatan manisan buah	Pelatihan Diversifikasi Bagi IKM - IRT Tahu di wilayah Tembakau	Sosialisasi penerapan SNI wajib, standar halal dan merek (HAKI)	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Olahan Buah dan Pengemasannya	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Industri Kecil Menengah Bandeng Presto
	Pelatihan Management bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pelatihan Peningkatan Kualitas dan diversifikasi produk kerajinan dari bahan daun mangga dan pelepah pisang masyarakat di wilayah tembakau	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang (Rokok) kena cukai ilegal	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pelatihan Inovasi dan Kreativitas Berbasis Teknologi Bagi Pengembangan Industri Kreatif
	Pembinaan Pembentukan LKM di kawasan industri tembakau	Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Bagi Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tembakau	Pembinaan dan Sosialisasi Pasar Tertib Ukur Alat-Alat UTTP	Pelatihan Pengurus Koperasi Wanita	Pelatihan Pengembangan Pewarnaan Batik Tulis Khas dan Manajemen IKM Batik
	Pembinaan Bagi KOPKAR Pabrik rokok	Sosialisasi penerapan SNI wajib, standar halal dan merek (HAKI)	Sosialisasi dan Relokasi Pedagang Pasar Sidoharjo	Pelatihan SDM Pengelola Koperasi	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat dilingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Penumbuhan Wira Usaha Baru Olahan

					Labu Kuning
	Pembinaan Fasilitas dan Perkuatan Modal Kerja IKM - IRT	Sosialisasi penggunaan elpiji tabung ukuran 3 Kg/ Konversi minyak tanah	Sosialisasi Achivement Motivation Training / AMT bagi IKM Se-Kabupaten Lamongan dan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Pelatihan Pengembangan Kemasan Produk Bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Makanan dan Minuman	
	Pembinaan IKM Rokok	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai bagi IKM Rokok di Daerah Petani Tembakau	Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu IKM / IRT	Pelatihan Pembuatan Kerupuk Ikan	
	Pelatihan Pembuatan Makanan dan Minuman bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Penghasil Tembakau/Daerah Penghasil bahan Baku Industri Hasil Tembakau			Pelatihan desain dan diversifikasi produk anyaman bambu bagi wilayah IKM di wilayah tembakau	

	Pelatihan Pengembangan Industri Alas Kaki Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau / daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau			Pelatihan Pengembangan Kemasan Produk dan Kewirausahaan / Teknologi Pangan Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Wingko	
	Pelatihan Desain kerajinan ukiran kayu bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau			Pelatihan Makanan dan Minuman Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	
	Pelatihan desain produk dan kemasan makanan-minuman bagi masyarakat di lingkungan industri rokok / daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau			Pelatihan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) telur asin bagi masyarakat di wilayah penghasil tembakau	

	Pelatihan desain batik dan konveksi bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau / daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau			Pelatihan pengolahan hasil perikanan laut dengan pengemasannya bagi masyarakat di wilayah pabrik rokok	
	Pelatihan peningkatan kualitas konveksi / bordir bagi bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau / daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau				
	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan IK. Otak-otak, Bandeng asap, Bandeng Presto, Abon Bandeng				
	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan IK Emping Jagung, Sukun, Pisang, Ketela				



	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan IK, Kurma Tomat, Tape				
	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan IK telur asin				
	Pelatihan Wira Usaha di Wilayah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengembangan Industri Batako dan Batapress				
	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan Industri Kecil Emping Garut				
<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Pembinaan PKL di Obyek Daya Tarik Wisata	Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern			
	Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern	Pelatihan Manajemen Rumah Makan/ Restaurant	Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern	Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern	Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern
<b>Kantor Kesbangpol</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>

			Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013	Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014	Sosialisasi Pilihan Bupati Dan Wakil Bupati
			Sosialisasi dan Jaringan Komunikasi HAM	Sosialisasi dan Jaringan Komunikasi HAM	Sosialisasi Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
				Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara	
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	
<b>Satpol PP</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal
<b>BPBD</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Pendidikan dan Pelatihan Formal
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Dan Ketrampilan Bagi Satlak Kecamatan dalam Penanggulangan Bencana	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Dan Pengadaan Peralatan Tim Reaksi Cepat

			Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarana Prasarana Bencana	Pelatihan Dan Pengadaan Peralatan Tim Reaksi Cepat	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana
			Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana	Pelatihan Dan Ketrampilan Bagi Satlak Kecamatan dalam Penanggulangan Bencana
				Pelatihan Dan Ketrampilan Bagi Satlak Kecamatan dalam Penanggulangan Bencana	Pelatihan Dan Stimulasi Penggunaan Sarana Prasarana Bencana
				Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarana Prasarana Bencana	Sosialisasi Penanggulangan Bencana
<b>Sekretariat Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Sosialisasi produk perundang-undangan	Sosialisasi produk perundang-undangan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sosialisasi Pengamanan Aset-Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Sosialisasi Pensertifikatan tanah kas Desa	Sosialisasi Pensertifikatan tanah kas Desa	Sosialisasi produk perundang-undangan	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Sosialisasi produk perundang-undangan	Penyelenggaraan Pendidikan Kemasyarakatan Kabupaten Lamongan

Pendidikan dan pelatihan formal aparaturnya Kecamatan	Sosialisasi Penghematan energi Inpres No. 2/2008	Sosialisasi Pensertifikatan tanah kas Desa	Sosialisasi produk perundang-undangan	Sosialisasi juklak dan juknis pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Sosialisasi dan Asistensi Program/Kegiatan Daba Bagi Hasil Cukai Tembakau	Sosialisasi dan Asistensi Program/Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Sosialisasi Permenpan dan Reformasi Birokrasi No 39 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Kerja	Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pelatihan Program Pengelolaan Keuangan Desa
Sosialisasi Cukai Hasil Tembakau Kepada Masyarakat		Sosialisasi Koordinasi Pelaksanaan ADA Gabah 2012	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan ADA Gabah Tahun 2013	Sosialisasi Permenpan dan Reformasi Birokrasi No 39 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Kerja	
Sosialisasi pembentukan gugus tugas penghematan energi Inpres No. 2/2008)		Sosialisasi Penghematan energi Inpres No. 13 Tahun 2011	Sosialisasi Penghematan energi Inpres No. 13 Tahun 2011	Sosialisasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa	
			Sosialisasi Penggunaan dan Pendistribusian LPG 3 Kg	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan ADA Gabah Tahun 2014	
				Sosialisasi dan Pendataan Terhadap Pengguna Air Tanah Kabupaten Lamongan	

				Sosialisasi Penghematan energi Inpres No. 13 Tahun 2011	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	
				Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	
<b>Sekretariat DPRD</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>DPPKA</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sosialisasi dan pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala Nasional	
		Pelatihan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah	Pelatihan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Formal	
		Pelatihan Akuntansi bagi SKPD Kecamatan	Pelatihan Standar Akuntansi Berbasis akrual	Pelatihan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah	

			Sosialisasi Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Sosialisasi dan pemeliharaan Penerapan Sistem Aplikasi Gaji Skala Nasional (Taspen, Askes, Taperum)		
<b>Dinas Pendapatan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal
<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis Bidang Kepegawaian	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sosialisasi Peraturan dan Petunjuk Teknis Bimbingan Kepegawaian	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS
		Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai	Sosialisasi PP nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai	Program Pendidikan Kedinasan	

		Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS		
<b>KORPRI</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		Sosialisasi Program Dewan Pengurus KORPRI	Sosialisasi Program Dewan Pengurus KORPRI	Sosialisasi Program Dewan Pengurus KORPRI	Sosialisasi Program Dewan Pengurus KORPRI
<b>Kantor Ketahanan Pangan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal		
<b>Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin	Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin
Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat		Pelatihan dan lomba forikan tingkat Kabupaten dan Propinsi	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM))		Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin	Pelatihan dan lomba forikan tingkat Kabupaten dan Propinsi	
<b>KPDE</b>					

2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi
					Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Berbasis TTG	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Pemantapan Kegiatan SPIP	Pelatihan Teknis Peternakan	Sosialisasi PERDA Rumah Potong Hewan
	Pembinaan Kemampuan, Ketrampilan dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peternak			Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Peternakan	
Dinas Perikanan dan Kelautan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyuluhan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Pelatihan Pembudidayaan Ikan Lele	Pengadaan dan pelatihan Teknologi budidaya perikanan	Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan		Pelatihan Pencegahan, Diagnosa dan Pengobatan Penyakit pada Ikan Dan Udang
	Pelatihan Pembudidayaan Ikan di Karamba	Pelatihan CCs (Cold Chain Storage) untuk Supplier			Pelatihan Teknologi Pembuatan Pakan Ikan Buatan



	Pelatihan Manajemen Kualitas Air dan Penyakit Ikan				Pelatihan Pengolahan, Penanganan Hasil Perikanan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Pelatihan Pembudidaya Ikan Patin				Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Di Lingkungan Penghasil Tembakau
	Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Ikan				
	Pembinaan dan Pengembangan perikanan				
<b>Dinas Pertanian &amp; Kehutanan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Sosialisasi dan Penerapan Agensia Hayati Perkebunan	Pelatihan Pengembangan Komoditi Holtikultura			Pelatihan Pengolahan Makanan Olahan Rumah Tangga	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Pelatihan Petugas, Petani Tembakau dan Pengkajian Pupuk Phonska pada Padi Terhadap Kualitas Tembakau	Pelatihan Petugas dan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan			Pelatihan Taruna Tani dan Wanita Tani	Pelatihan Pengolahan Makanan Olahan Rumah Tangga
	Pembinaan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Terpadu			Pelatihan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan	Penguatan Kelembagaan kelompok Tani Tembakau Melalui Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau

	Pembinaan dan Pengadaan Tanaman Penghijauan Produktif				Penguatan Kelembagaan kelompok Tani Tembakau Melalui Pelatihan Pengembangan Komoditas Tembakau Bagi Petani
					Penguatan Kelembagaan kelompok Tani Tembakau Melalui Pelatihan Penumbuhan Koperasi Bagi Kelompok Tani Tembakau
					Pelatihan Taruna Tani dan Wanita Tani
					Pelatihan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan
<b>Bappeda</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sosialisasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	Sosialisasi Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Pengembangan program pendidikan untuk semua / replikasi program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Koordinasi dan Sosialisasi Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan Tahun 2014

			Kab.Lamongan		
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		Sosialisasi Buku Lamongan Dalam Angka
		Sosialisasi Rencana Penataan Ruang Menara Telekomunikasi (Cell Plan)			Sosialisasi Buku Kecamatan Dalam Angka
		Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah			Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sosialisasi Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan			
		Perencanaan dan Sosialisasi Program Bedah Rumah			
<b>Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Pendidikan dan Pelatihan Informasi	Pendidikan dan pelatihan informasi	Pendidikan dan pelatihan informasi

		Pendidikan dan pelatihan informasi	Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
<b>Badan Penanaman Modal</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Penyuluhan / Sosialisasi Perijinan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal
			Sosialisasi undang-undang tentang perijinan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
				Sosialisasi Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Sosialisasi Perijinan pada Organisasi Perempuan Kab.Lamongan
<b>Kantor Perijinan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Penyuluhan / sosialisasi perijinan				
<b>Inspektorat</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Bimbingan Tekhnis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pendidikan dan Pelatihan Formal
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

			Pengawasan		Pengawasan
		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			
<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
				Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda	Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda
				Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan di Tingkat Propinsi dan Nasional	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Pemuda Pembinaan Pramuka Sekolah

### 3. ASB Pembangunan Gedung Kantor

Dinas Pendidikan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pembangunan Gedung Sekolah		Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunan Ruang Kelas Sekolah					
Dinas Kesehatan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pembangunan Rumah Sakit	Pendirian dan Pengembangan Poliklinik di Puskesmas	Pembangunan Ponkesdes			
Pendirian dan pengembangan Poliklinik akibat rokok di Puskesmas	Pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium	Pembangunan Sarana Prasarana Akademi Keperawatan			
RS Ngimbang					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	
Cipta Karya					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor
Dinas Perhubungan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pembangunan Gedung					

Terminal					
<b>Dinas Budaya dan Pariwisata</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	
<b>BPBD</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
			Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	
<b>Sekretariat DPRD</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
			Pembangunan Gedung Kantor		
<b>Dinas Pertanian dan Kehutanan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Pembangunan Gedung/Kantor BPP	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor BPP	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor
<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
			Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	
<b>Dinas Perikanan dan Kelautan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pembangunan Kantor dan Ruang Pertemuan Pos Penyuluh	Pembangunan Pos Pengawasan Sumberdaya Ikan		Pembangunan Gedung Penyuluhan		Pembangunan Gedung kantor
Pembangunan Gudang Ikan	Pembangunan gedung serba guna BBI		Pembangunan Gedung Pertemuan Pengawas		

	Pembangunan Gedung Penyuluhan				
<b>Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	
<b>KPDE</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
				Pembangunan Gedung Kantor	
<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
				Pembangunan Gedung Kantor	
<b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
					Pembangunan Gedung Kantor
<b>BPPKB</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
					Pembangunan Gedung Kantor
<b>Inspektorat</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
					Pembangunan Gedung Kantor
<b>Badan Pemberdayaan Masyarakat</b>					



2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Pembangunan Gedung Kantor			Pembangunan Gedung Kantor

#### 4. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dinas Pendidikan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah				
Dinas Kesehatan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
RSUD Dr. Soegiri					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit					

BS Nalmbang					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
PU Bina Marga					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			

Kantor Penelitian & Pengembangan Daerah					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
Dinas Perhubungan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
Kantor Lingkungan Hidup					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
2010	2011	2012	2013	2014	2015

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
<b>BPPKB</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
<b>Dinas Sosial, Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
<b>Dinas Koperasi, Industri &amp; Perdagangan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
<b>Badan Kesatuan, Politik &amp; Perlindungan Masyarakat</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			
<b>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
<b>BPBD</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
<b>Sekretariat Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			
<b>Sekretariat DPRD</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
<b>DPPKA</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
<b>Badan Kepegawalan Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
<b>Kantor Ketahanan Pangan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
<b>Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>					

2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
KPDE					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			
Dinas Pertanian dan Kehutanan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015



Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
<b>Dinas Perikanan dan Kelautan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
<b>Bappeda</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			
<b>Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			

Badan Penanaman Modal dan Perijinan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Inspektorat					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			
Kantor Perijinan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				

### ASB Penyediaan Makan dan Minum

Dinas Pendidikan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman harian siswa SDLB
Penyediaan makanan dan minuman harian	Penyediaan makanan dan minuman harian	Penyediaan makanan dan minuman harian	Penyediaan makanan dan minuman harian siswa SDLB	Penyediaan makanan dan minuman harian siswa SDLB	
Dinas Kesehatan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas
Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas	
		Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin		Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	
RS Ngimbang					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	
Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga					

2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Pekerjaan Umum Pengairan</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Kantor Penelitian &amp; Pengembangan Daerah</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Perhubungan</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Badan Lingkungan Hidup</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Kependudukan &amp; Catatan Sipil</b>					

2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>BPPKB</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Sosial, Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Kopindag</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Badan Kesatuan, Politik &amp; Perlindungan Masyarakat</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Sampel PP</b>					



2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>BPRD</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	
<b>Sekretariat Daerah</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Sekretariat DPRD</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>DPPKA</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Pendapatan</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
					Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>					

2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>KORPRI</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Kantor Ketahanan Pangan</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>KPDE</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Pertanian dan Kehutanan</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>					

2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Perikanan dan Kelautan</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Bappeda</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	
<b>Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Badan Penanaman Modal</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
<b>Inspektorat</b>					



2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
RSUD. Dr. Soegiri					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Makanan dan Minuman					
Kantor Perijinan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Penyediaan Makanan dan Minuman				

## 5. ASB Penyediaan ATK

Dinas Kebudayaan & Pariwisata					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sekertariat DPRD					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Perikanan & Kelautan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Assest (Pembiayaan)					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor

Badan Kepegawaian Daerah					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Inspektorat					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Koperasi, Industri & Perdagangan					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Badan pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor

<b>Kantor Ketahanan Pangan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Kantor Pengolahan Data Elektronik</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Badan Lingkungan Hidup</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Kantor Penelitian &amp; Pengembangan Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Badan Kesatuan, Politik &amp; Perlindungan Masyarakat</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Dinas Kesehatan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>

Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Dinas Pendidikan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>DPU Cipta Karya</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		
<b>Sekretariat Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Dinas Perhubungan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Dinas Pekerjaan Umum Pengairan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja</b>					



2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>DPU Cipta Karya</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Dinas Pertanian &amp; Kehutanan</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor+F243:G253	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>RSUD Dr. Soegiri</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor					
<b>Dinas Sosial, Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Dinas Peternakan &amp; Kesehatan Hewan</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>RSUD Ngimbang</b>					
2010	2011	2012	2013	2014	2015

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
<b>Badan Penanaman Modal &amp; Perijinan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Dinas Pemuda &amp; Olah Raga</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Kantor Perijinan</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor			
<b>Badan Perpustakaan &amp; Arsip Daerah</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>KORPRI</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
<b>Dinas Pendapatan</b>					

2010	2011	2012	2013	2014	2015
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor



4. Penginputan Data

Data kegiatan dalam setiap kelompok ASB akan diinput dalam format sebagai berikut:

<b>Dinas:</b>	
<b>Nama Sampel:</b>	
<b>Tahun :</b>	

No	Rincian Objek Belanja	Jumlah	%
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
dst			

Rp -

Nama sampel merupakan nama kegiatan yang termasuk sampel dalam kelompok ASB. Tahun adalah tahun kegiatan tersebut terjadi. Rincian objek belanja merupakan pos belanja-belanja yang dianggarkan pada level kode rekening rincian obyek dalam kegiatan serta persentasenya dalam total anggaran kegiatan. Belanja-belanja yang serupa bisa digabungkan menjadi satu nama belanja. Seluruh kegiatan akan diinput dengan format yang sama dalam *sheet* yang berbeda.

5. Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data ialah dengan *student- t distribution*, yakni metode dengan standar deviasi populasi tidak diketahui dan sampel yang kecil (<30).

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$X \pm t \frac{s}{\sqrt{n-1}}$$

Keterangan:

- X : nilai belanja
- t : nilai yang diambil dari *t-table*, dengan tingkat keyakinan 95 % dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) (n-1)
- s : deviasistandar
- n : ukuran sampel

Pengolahan data tersebut akan menghasilkan *output* berupa nilai rata-rata, nilai maksimal (batas atas), dan nilai minimal (batas bawah) baik dalam jumlah rupiah maupun dalam persentase. Format pengisian olah data adalah sebagai berikut:

	Rata-rata	deviasi standar	min	Max	nilai-t	batas bawah	batas atas
Y	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp
X1							
X2							
X3							
X4							
X5							
X6							
X7							
X8							
X9							

Kolom paling atas akan diisi dengan nominal rupiah sedangkan kolom berwarna putih akan diisi dengan nilai persentase. X1 sampai X9 menunjukkan objek belanja dalam setiap kegiatan. Setelah itu, format dari *output* pengolahan data adalah sebagai berikut :

	Rata-rata	batas bawah	batas atas
Total Anggaran	Rp	Rp	Rp

No	Rincian Objek Belanja	% Alokasi Belanja		
		Rata-rata	batas bawah	batas atas
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

*Output* merupakan rangkuman dari pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Di dalam *output*, hanya dituliskan hasil akhir dari olahan data yakni berupa nilai rata-rata serta nilai maksimal (batas atas) dan nilai minimal (batas bawah).

Untuk memenuhi prinsip kewajaran belanja, setiap kegiatan wajib memenuhi syarat nilai maksimal dan minimal nya baik dalam persentase maupun dalam jumlah rupiahnya. Jadi, apabila ada suatu kegiatan yang alokasi persentase belanjanya masih dalam cakupan (*range*) namun jumlah nominal rupiahnya sudah melebihi batas maksimal atau minimalnya, maka anggaran kegiatan tersebut tetap tidak bisa dikatakan wajar, begitu pula sebaliknya.

#### IV.RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN

Penyusunan ASB ini memiliki ruang lingkup dan juga keterbatasan sendiri, antara lain:

1. ASB ini dibentuk dari sampel kegiatan tahun 2010 sampai 2015, sehingga besaran kegiatan maupun biaya variabel yang tercantum merupakan nilai dari kegiatan di 6 (enam) tahun tersebut.
2. ASB dibentuk tanpa mengetahui nominal jelas dari cost driver, sehingga tidak dapat ditentukan biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost) nya. Jadi, pengaplikasian ASB ini hanya bisa dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang sejenis (termasuk besaran kegiatannya) dengan yang pernah terjadi sebelumnya.
3. ASB ini hanya mengakomodir jenis kegiatan rutin atau umum dan belum mengakomodir jenis kegiatan khusus SKPD. Dengan demikian, maka untuk kedepannya perlu disusun kembali ASB untuk sampel kegiatan khusus SKPD.

Berikut adalah ringkasan mengenai kegiatan yang dapat dibuat output ASB:

No	Kegiatan	Letak SKPD	Cost Driver
<b>ASB UMUM:</b>			
1	Diklat Teknis (cth: Bimtek)	SKPD	orang, hari
2	Diklat Non Teknis (cth: Sosialisasi)	SKPD	orang, hari
3	Pembangunan Gedung Sederhana	SKPD	Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
4	Pemeliharaan Rutin Gedung	SKPD	Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
5	Penyediaan Makan dan Minum	SKPD	orang, jumlah rapat
6	Persediaan ATK	SKPD	

## V. OUTPUT ANALISIS STANDAR BELANJA

Output Analisis Standar Belanja dibagi kedalam beberapa kelompok berdasarkan data yang sudah lengkap atau cukup lengkap. Output dikerjakan dengan pada bagian kertas kerja dalam microsoft excel yang memuat seluruh inventarisasi kegiatan yang berisi informasi mengenai belanja setiap objek.

Untuk mempermudah duplikasi antara satu kertas kerja dengan kertas kerja lainnya maka di dalam excel dibuat formula. Beberapa formula yang tersedia dalam excel adalah perhitungan untuk:

- Rata-rata menggunakan **"=average (...)"**
- Deviasi standar menggunakan **"=stdev.s (...)"**
- Nilai Minimum dan Maksimum menggunakan **"=min(..)"** dan **"=max(...)"**
- Nilai statistik-t menggunakan **"=T.INV.2T( $\alpha$ ;n-1)"**

Dimana  **$\alpha$  (alpha)**= 5% adalah tingkat signifikansi statistik, dengan kata lain tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. n adalah banyaknya sampel.

Selain menggunakan formula yang tersedia dalam microsoft excel untuk menghitung nilai statistik, di dalam perhitungan satu kegiatan dengan kegiatan lain menggunakan rumus.

Hasil perhitungan Analisis Standar Belanja ditampilkan dalam penjelasan tiap ASB berikut outputnya:

### V.1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Deskripsi:

Pendidikan dan Pelatihan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Sifat kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Satuan hitung : Rupiah/ jumlah peserta/ hari

Hasil ASB:



Tabel output ASB diatas dapat digunakan sebagai dasar dalam penganggaran yang mungkin terjadi dengan contoh dibawah ini:

Contoh kasus 1

Dinas X merencanakan suatu kegiatan diklat untuk dapat memfasilitasi 30 peserta selama 10 hari. Berapa anggaran yang wajar untuk kegiatan ini?

Dari keterangan diatas maka kita dapat hitung rata-rata anggaran yang dibutuhkan, batas bawah dan batas atas anggaran sebagai berikut:

ASB	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Rp/Peserta/Hari	1.298.317,6	457.485	2.139.150,74
Total Anggaran	Rp. 1.298.317,6 x 30 peserta x 10 hari = <b>Rp 389.495.290</b>	Rp. 457.485x 30 peserta x 10 hari = <b>Rp 137.245.357</b>	Rp. 2.139.150,74 x 30 peserta x 10 hari = <b>Rp 641.745.222</b>

Maka berdasarkan perhitungan diatas, rencana anggaran sebesar **Rp 389.495.290** untuk melaksanakan diklat yang dapat diikuti oleh 30 peserta selama 10 hari. Anggaran minimal yang dibutuhkan adalah **Rp 137.245.357**, sementara batas atas anggaran tertinggi adalah **Rp 641.745.222**. Kisaran ASB tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penganggaran.

Contoh Kasus 2:

Anggaran sebesar Rp 300 juta akan digunakan untuk melaksanakan diklat yang diharapkan dapat menampung 50 peserta. Berapa perkiraan jumlah hari yang dapat dilaksanakan?

Berdasarkan infomasi diatas maka kita dapat menghitung jumlah hari sebagai berikut:

Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
1.298.317,6	457.485	2.139.150,74
Rp 300 juta/50 peserta/ Rp 1.298.317,6=	Rp 300 juta/50 peserta/ Rp 457.485=	Rp 300 juta/50 peserta/ Rp 2.139.150,74=
<b>5 hari</b>	<b>13 hari</b>	<b>3 hari</b>

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk 50 peserta, secara rata-rata kita dapat melaksanakan suatu diklat selama 5 hari. Jumlah hari minimal yang dapat kita laksanakan adalah 3 hari dan maksimal 13 hari. Dari sisi panitia berapa hari yang akan dipilih sangat berkaitan erat dengan kualitas input yang dibelanjakan. Pemilihan jumlah hari yang besar akan mengorbankan kualitas dari pelaksanaan diklat, sementara jumlah hari kecil yang dipilih akan meningkatkan pelaksanaan diklat misalnya pembelian bahan makanan, material, hadiah dan lain sebagainya.

**Contoh Kasus 3:**

Berikut adalah rencana anggaran suatu diklat yang diusulkan oleh dinas bernilai Rp 348 juta. Apakah rencana anggaran tersebut wajar menurut ASB Diklat Lamongan?

Rencana Anggaran Biaya		
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.000.000
3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	10.000.000
4	Honorarium Penerima Barang	
5	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.000.000
6	Honorarium Tenaga Kebersihan	
7	Honorarium Tenaga Pengamanan	
8	Honor Tenaga Protokol/operator/dokumentasi	-
9	Uang Lembur PNS	10.000.000
10	Belanja Alat Tulis Kantor	
11	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering DII)	
12	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
13	Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan Praktek Kerja	
14	Belanja Sertifikasi	
15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	
16	Belanja Cetak	15.000.000
17	Belanja Penggandaan	
18	Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan	
19	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	
20	Belanja Sewa Meja Kursi	
21	Belanja Sewa Sound System	
22	Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Semiloka, Lokakarya dan Sejenisnya	45.000.000
23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
24	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000
25	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	
26	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000
27	Transportasi dan Akomodasi	



28	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	
29	Honorarium Petugas Lapangan	
30	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000
31	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	
32	Honor Tenaga Protokol/operator/dokumentasi	
33	Belanja Jasa Kebersihan	
34	Belanja Jasa Pengamanan	
<b>Total</b>		<b>Rp 348.000.000</b>

Dengan menggunakan analisis kewajaran batas bawah dan batas atas untuk setiap obyek belanja, dan kemudian kita sandingkan dengan rencana anggaran diklat tersebut maka, tabel berikut menyajikan perbandingannya:

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan		Batas Atas		Batas Bawah	
No	Uraian Kegiatan	RAB	Batas Atas	Batas Bawah	Perbedaan
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000	1.699.692	12.529.766	
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.000.000	-	1.048.679	
3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	10.000.000	-	1.616.194	
4	Honorarium Penerima Barang		-	578.743	
5	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.000.000	-	61.243.130	
6	Honorarium Tenaga Kebersihan		-	-	
7	Honorarium Tenaga Pengamanan		-	-	
8	Honor Tenaga Protokol/operator/dokumentasi	-	-	2.315.943	
9	Uang Lembur PNS	10.000.000	-	13.750.951	
10	Belanja Alat Tulis Kantor		-	16.401.723	
11	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering Dll)		-	527.074	
12	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		1.620	98.547	
13	Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan Praktek Kerja		-	27.356.320	
14	Belanja Sertifikasi		-	32.925.173	
15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi		-	2.090.959	
16	Belanja Cetak	15.000.000	2.247.403	20.989.944	
17	Belanja Penggandaan		-	1.790.495	
18	Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan		-	-	
19	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat		-	-	
20	Belanja Sewa Meja Kursi		-	1.414.286	
21	Belanja Sewa Sound System		-	1.280.628	
22	Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Semiloka, Lokakarya dan	45.000.000	-	86.659.682	

	Sejenisnya			
23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		-	4.308.774
24	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000	-	67.142.289
25	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		-	254.265.741
26	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000	-	154.880.895
27	Transportasi dan Akomodasi		-	15.259.927
28	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos		-	-
29	Honorarium Petugas Lapangan		-	-
30	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000	-	4.950.426
31	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		-	230.195
32	Honor Tenaga Protokol/operator/dokumentasi		-	-
33	Belanja Jasa Kebersihan		-	1.220.681
34	Belanja Jasa Pengamanan		-	1.220.681
<b>Total</b>		<b>Rp 348.000.000</b>		

Dari analisis diatas terlihat bahwa terdapat 4 (empat) objek belanja yang diluar batas kewajaran anggaran yaitu Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa dan Belanja makanan dan minuman rapat. Dengan demikian, maka SKPD yang melaksanakan penganggaran tersebut harus mengurangi belanja pada keempat rincian objek tersebut.

Selain dari tiga contoh kasus diatas, beberapa kasus dapat mungkin terjadi dalam penganggaran. Contoh lain adalah ketika anggaran yang diajukan berada jauh dibatas bawah anggaran maka anggaran tersebut juga dapat dianggap tidak wajar. Suatu kegiatan mungkin saja dijalankan dengan anggara yang berada jauh dari batas bawah, namun kegiatan tersebut sudah pasti akan mengorbankan kualitas dari output kegiatan tersebut. Kegiatan yang nilai anggarannya berada pada nilai rata-rata adalah kegiatan yang sangat wajar dengan target output yang tidak mengorbankan kualitas.

### V.2 Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis

Deskripsi:

Pendidikan dan Pelatihan Non Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan biasa kepada para pegawai di lingkungan SKPD tanpa keahlian teknis. Kegiatan ini tidak menggunakan Narasumber Pakar/Ahli. Bimbingan ini lebih bersifat tutorial dan atau bukan merupakan kebutuhan utama organisasional untuk menyelesaikan masalah sehari-harinya serta juga bukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keahlian khusus.

Satuan hitung: Rupiah/ jumlah peserta/ hari

ASB diklat non teknis dipisahkan antara ASB dengan belanja modal dan ASB tanpa belanja modal. Tujuan dari pengelompokkan tersebut adalah untuk menghitung persentase alokasi belanja masing-masing objek apabila terdapat kedua kasus tersebut. ASB diklat non teknis dihitung dengan cost driver (unit hitung) jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan diklat non teknis. Tabel I dibawah menggambarkan ASB Diklat Non Teknis dengan Belanja Modal dan Tabel II menggambarkan ASB Diklat Non Teknis tanpa Belanja Modal.

I. Diklat Non Teknis Dengan Belanja Modal

ASB Diklat Non Teknis Dengan Belanja Modal				
		990.735,1	542.386	1.439.084,26
Rincian Objek Belanja				
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,5	6,08	8,91
2	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7,5	5,29	9,77
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,1	0,07	0,19
4	Belanja Alat Tulis Kantor	5,3	4,10	6,43
5	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	1,4	0,95	1,89
6	Belanja Cetak	7,5	4,54	10,39
7	Belanja Penggandaan	1,6	1,11	2,18
8	Belanja makanan dan minuman rapat	10,6	8,58	12,59
9	Belanja Sosialisasi	0,3	-	0,65
10	Transportasi dan Akomodasi	4,1	1,91	6,19
11	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8,3	5,45	11,13
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,6	0,85	2,34
13	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,4	-	0,79
14	Uang Lembur PNS	1,5	0,63	2,28
15	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	0,1	-	0,24
16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,1	1,36	2,91
17	Belanja Bimbingan Teknis	5,7	1,21	10,21
18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	0,0	-	0,07
19	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,0	-	0,13
20	Belanja Sewa Meja Kursi	0,4	-	0,88
21	Belanja Sewa Sound System	0,2	-	0,40
22	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,1	0,00	0,12
23	Honorarium Penerima Barang	0,0	-	0,04
24	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,0	-	0,01
25	Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan Praktek Kerja	7,1	3,70	10,53
26	Belanja Sewa Ruang Rapat/pertemuan	1,8	0,40	3,23

27	Belanja Modal Pengadaaan Printer	0,0	-	0,09
28	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	0,6	-	1,44
29	Honorarium Tenaga Kebersihan	0,0	-	0,07
30	Honorarium Tenaga Pengamanan	0,0	-	0,01
31	Honor Tenaga Protokol/operator/dokumentasi	0,0	-	0,01
32	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	0,0	-	0,02
33	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,0	-	0,00
34	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,0	-	0,00
35	Belanja Sertifikasi	0,1	-	0,30
36	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,2	-	0,60
37	Belanja Bibit Ternak	0,7	-	2,14
38	Belanja Sewa Peralatan Praktek Las	0,0	-	0,05
39	Belanja Makanan dan Minuman Diklat,Seminar,Semiloka,Lokakarya	1,3	0,19	2,32
40	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10,0	4,56	15,44
41	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,4	-	0,84
42	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,0	-	0,03
43	Belanja Peralatan Kerja	0,1	-	0,24
44	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,1	-	0,24
45	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,1	0,04	0,14
46	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	0,0	-	0,10
47	Belanja Modal Kontruksi Papan Informasi	0,4	-	1,07
48	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	0,4	-	1,18
49	Belanja Upah Tenaga Kerja	0,0	-	0,07
50	Belanja Sewa Peralatan Praktek	0,0	-	0,03
51	Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	3,9	0,49	7,40
52	Belanja Jasa Kebersihan	0,0	-	0,08
53	Belanja Sewa Tempat Penginapan/Hotel	0,3	-	0,64
54	Uang Lembur Non PNS	0,0	-	0,02
55	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,0	-	0,02
56	Belanja Jasa Pengamanan	0,0	-	0,01
57	Belanja jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur	4,1	2,25	5,98
58	Belanja modal pengadaan komputer/PC	0,1	-	0,33
59	Belanja Pakaian Kostum/Seragam	0,5	-	1,65
60	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,2	-	0,62
61	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,7	-	2,10

## II. Diklat Non Teknis Tanpa Belanja Modal

[illegible]

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,5	6,10	8,93
2	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7,6	5,33	9,82
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,1	0,07	0,19
4	Belanja Alat Tulis Kantor	5,3	4,12	6,46
5	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	1,4	0,95	1,89
6	Belanja Cetak	7,5	4,55	10,41
7	Belanja Penggandaan	1,6	1,12	2,18
8	Belanja makanan dan minuman rapat	10,7	8,65	12,69
9	Belanja Sosialisasi	0,3	-	0,65
10	Transportasi dan Akomodasi	4,1	1,91	6,19
11	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8,4	5,50	11,22
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,6	0,86	2,36
13	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,4	-	0,79
14	Uang Lembur PNS	1,5	0,63	2,28
15	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	0,1	-	0,24
16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,1	1,38	2,92
17	Belanja Bimbingan Teknis	5,7	1,21	10,21
18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	0,0	-	0,07
19	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,0	-	0,13
20	Belanja Sewa Meja Kursi	0,4	-	0,88
21	Belanja Sewa Sound System	0,2	-	0,40
22	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,1	0,00	0,12
23	Honorarium Penerima Barang	0,0	-	0,04
24	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,0	-	0,01
25	Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan Praktek Kerja	7,2	3,74	10,58
26	Belanja Sewa Ruang Rapat/pertemuan	1,8	0,40	3,26
27	Honorarium Tenaga Kebersihan	0,0	-	0,08
28	Honorarium Tenaga Pengamanan	0,0	-	0,01
29	Honor Tenaga Protokol/operator/dokumentasi	0,0	-	0,01
30	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	0,0	-	0,02
31	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,0	-	0,00
32	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,0	-	0,00
33	Belanja Sertifikasi	0,1	-	0,30
34	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,2	-	0,60
35	Belanja Bibit Ternak	0,7	-	2,14
36	Belanja Sewa Peralatan Praktek Las	0,0	-	0,05

37	Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Semiloka, Lokakarya	1,3	0,19	2,32
38	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10,0	4,56	15,44
39	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,4	-	0,84
40	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,0	-	0,03
41	Belanja Peralatan Kerja	0,1	-	0,24
42	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,1	0,04	0,14
43	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	0,0	-	0,10
44	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	0,4	-	1,18
45	Belanja Upah Tenaga Kerja	0,0	-	0,07
46	Belanja Sewa Peralatan Praktek	0,0	-	0,03
47	Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	3,9	0,49	7,40
48	Belanja Jasa Kebersihan	0,0	-	0,08
49	Belanja Sewa Tempat Penginapan/Hotel	0,3	-	0,66
50	Uang Lembur Non PNS	0,0	-	0,02
51	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	0,0	-	0,02
52	Belanja Jasa Pengamanan	0,0	-	0,01
53	Belanja jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur	4,2	2,26	6,05
54	Belanja Pakaian Kostum/Seragam	0,5	-	1,65
55	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,2	-	0,62
56	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,8	-	2,34

Tabel output ASB diatas dapat digunakan sebagai dasar dalam penganggaran yang mungkin terjadi dengan contoh dibawah ini:

Contoh Kasus

Contoh kasus penggunaan ASB diklat non-teknis dapat menggunakan kasus diklat teknis pada bagian V.1. Sebagai gambaran misalnya SKPD menganggarkan Rp 100 juta untuk diklat non-teknis untuk 20 peserta dengan memperhitungkan belanja modal. Berapakah jumlah hari yang dapat dilakukan?

Jawabannya ada dalam perhitungan pada tabel bawah ini:

Rata-rata	Belanja Modal	hari modal
<b>990.735,1</b>	<b>542.386</b>	<b>1.439.084,26</b>
Rp 100 juta/ Rp 990.735,1/ 20 orang=	Rp 100 juta/ Rp 542.386/ 20 orang=	Rp 100 juta/ Rp 1.439.084,26/ 20 orang=
<b>5 Hari</b>	<b>9 Hari</b>	<b>3 Hari</b>

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, bahwa dengan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk 20 peserta, secara rata-rata kegiatan dapat dilaksanakan selama 5 hari. Sementara itu, jumlah hari minimal yang dapat kita laksanakan adalah 3 hari dan maksimal 9 hari.

**V.3 Pembangunan Gedung Kantor**

Deskripsi :

Pembangunan gedung kantor merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi yang dibutuhkan oleh SKPD ataupun masyarakat umum yang mencakup bangunan gedung, pagar dan komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar gedung tersebut dapat berfungsi termasuk instalasi listriknya.

Satuan hitung: Rupiah/ meter persegi

Acuan penyusunan ASB Pembangunan Gedung Kantor ini berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hargayang tertera dalam HSBGN merupakan nilai Rupiah batas atas, sementara batas bawah ditentukan dari 90 persen batas atas (harga tertinggi) melalui diskusi dengan Dinas Cipta Karya. Berikut adalah hasil perhitungan dari ASB Pembangunan Gedung Kantor.

Hasil ASB:

**I. ASB Pembangunan Gedung**

	batas bawah	batas atas
harga satuan bangunan (Rp per meter persegi)	4.635.000	5.150.000
harga satuan pagar-depan (Rp per meter)	1.773.000	1.970.000
harga satuan pagar-samping (Rp per meter)	1.566.000	1.740.000

No	Rincian Objek Belanja	% Alokasi Belanja		
		batas bawah	batas bawah	batas atas
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,2	1,9	10,5
2	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,6	0,2	1,0
3	Belanja Alat Tulis Kantor	1,9	0,8	3,0
4	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan gedung pendidikan	3,2	0,0	7,6
5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Kesehatan	3,2	0,0	7,7

6	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,2	0,0	0,4
7	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	0,6	0,0	1,2
8	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	3,5	0,0	8,0
9	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3,7	0,0	8,3
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,1	0,0	2,3
11	Uang Lembur PNS	0,9	0,0	2,1
12	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	1,0	0,0	2,5
13	Belanja Cetak	0,2	0,0	0,3
14	Belanja Penggandaan	0,6	0,1	1,2
15	Belanja makanan dan minuman rapat	0,6	0,1	1,1
16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	0,0	0,0	0,0
17	Transportasi dan Akomodasi	0,0	0,0	0,0
18	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	0,0	0,0	0,0
19	Belanja modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin	0,3	0,0	0,6
20	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	0,0	0,0	0,1
21	Belanja modal pengadaan komputer/PC	0,2	0,0	0,6
22	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	0,2	0,0	0,5
23	Belanja Modal Pengadaaan Printer	0,1	0,0	0,3
24	Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer	0,0	0,0	0,1
25	Belanja modal pengadaan rak buku/TV/Kembang	0,1	0,0	0,3
26	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	0,1	0,0	0,4
27	Belanja Modal Pengadaan alat-alat multimedia	0,0	0,0	0,1
28	Belanja Modal Pengadaan Roll Meter	1,6	0,0	4,9
29	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Diameter	0,0	0,0	0,0
30	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Laser Distance Meter	0,1	0,0	0,4
31	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,3	0,0	9,2
32	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	1,6	0,0	4,7
33	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,0	0,0	0,1
34	Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan/Pengawasan	0,0	0,0	0,1
35	Belanja Penjilidan	0,0	0,0	0,0
36	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,2	0,0	0,6
37	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	0,1	0,0	0,3
38	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Kantor	37,9	26,6	49,3
39	Honorarium Komisi Pemeriksa Pelaksanaan Pekerjaan	1,7	0,0	4,9
40	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan lainnya	4,8	0,0	10,1



41	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,2	0,1	0,3
42	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,0	0,0	0,1
43	Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan tempat ibadah	3,2	0,0	7,8
44	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,0	0,0	0,0
45	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	0,0	0,0	0,0
46	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	0,0	0,0	0,0
47	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,0	0,0	0,0
48	Belanja Modal Pengadaan Hammer Tes	0,0	0,0	0,0
49	Belanja Modal Pengadaan Caliper Digital	0,0	0,0	0,0
50	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	5,9	0,7	11,0
51	Belanja Modal Konstruksi Pagar	4,1	0,0	8,7
52	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan taman	1,3	0,0	3,2
53	Belanja modal Pengadaan meja rapat	0,0	0,0	0,1
54	Belanja Modal Pengadaan Podium	0,0	0,0	0,0
55	Belanja modal Pengadaan sound system	0,0	0,0	0,1
56	Belanja Upah Tenaga Kerja	0,6	0,0	1,4
57	Belanja Modal Pengadaan Almari Kantor	0,0	0,0	0,0
58	Belanja modal pengadaan Penghias Ruangan	-	0,0	-
59	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	0,0	0,0	0,0
60	Belanja modal Pengadaan meja tamu	0,0	0,0	0,0
61	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	0,0	0,0	0,0
62	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	0,0	0,0	0,0
63	Belanja Jasa Instalasi Listrik, Air& Telepon	0,0	0,0	0,1
64	Belanja Modal Pengadaan handycam	0,0	0,0	0,1
65	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	2,4	0,1	4,8
66	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Gedung Kantor	0,1	0,0	0,3

#### Contoh kasus

Apabila direncanakan pembangunan gedung kantor satu lantai dengan luas 200 meter persegi. Panjang pagar depan adalah 10 meter. Berapakah batas anggaran yang wajar menurut ASB?

Jawab:

Perhitungan total anggaran yang wajar dapat dilakukan menggunakan tabel berikut:

	batas bawah	batas atas
harga satuan bangunan (Rp per meter persegi)	4.635.000	5.150.000
<b>Anggaran gedung 200 meter persegi (Rp)</b>	200 meter persegi x Rp 4.635.000 =  <b>Rp 927.000.000</b>	200 meter persegi x Rp 5.150.000 =  <b>Rp 1.030.000.000</b>
harga satuan pagar-depan (Rp per meter)	1.773.000	1.970.000
<b>Anggaran pagar depan 10 meter (Rp)</b>	10 meter x Rp 1.773.000 =  <b>Rp 17.730.000</b>	10 meter x Rp 1.970.000 =  <b>Rp 19.700.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp 944.730.000</b>	<b>Rp 1.049.700.000</b>

Berdasarkan perhitungan total anggaran pada tabel di atas bahwa perhitungan dibagi dalam dua bagian, yaitu anggaran pembangunan gedung dan anggaran pembangunan pagar depan. Total anggaran yang dibutuhkan adalah antara Rp 945 juta s/d Rp 1.050 juta.

#### V.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Deskripsi:

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah kegiatan memelihara, memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung kantor tetap laik fungsi.

Satuan hitung: Rupiah/meter persegi

Seperti halnya ASB Pembangunan Gedung Kantor, acuan perhitungan juga berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Lamongan. Besarnya anggaran pemeliharaan rutin gedung kantor sulit ditentukan karena tergantung pada banyak hal, diantaranya adalah luas bangunan, dan tingkat kerusakan. Oleh karena itu ditentukan **batas maksimal penyusutan 2 (dua) persen per tahun** dari HSBGN yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PU No.45 tahun 2007. Dengan demikian hasil perhitungan dari ASB Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah sebagai berikut:

**I. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung**

	batas maksimal	HSBGN
harga satuan bangunan (Rp per meter persegi)	103.000	5.150.000
harga satuan pagar-depan (Rp per meter)	39.400	1.970.000
harga satuan pagar-samping (Rp per meter)	34.800	1.740.000

No	Rincian Objek Belanja	% Alokasi Belanja		
		rata-rata	batas bawah	batas atas
1	Belanja Pemeliharaan Gedung	68,6	55,6	82
2	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	4,5	0,2	9
3	Belanja Pemeliharaan Taman	1,6	0,0	5
4	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	0,5	0,0	2
5	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,2	0,0	0
6	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,0	0,0	0
7	Uang Lembur PNS	0,2	0,0	1
8	Uang Lembur Non PNS	0,0	0,0	0
9	Belanja Bahan Baku Bangunan	23,7	14,0	33
10	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,1	0,0	0
11	Belanja Bahan Kimia	0,0	0,0	0
12	Belanja Jasa Pembayaran PBB	0,0	0,0	0
13	Belanja Upah Tenaga Kerja	2,6	0,5	5
14	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,0	0,0	0
15	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,0	0,0	0
16	Belanja Alat Tulis Kantor	0,1	0,0	0
17	Belanja Penggandaan	0,0	0,0	0
18	Belanja Modal Pengadaan Korden	0,3	0,0	1

Berdasarkan Peraturan Menteri PU yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perhitungan anggaran maksimal Pemeliharaan Gedung adalah sebagai berikut:

Anggaran maksimal pemeliharaan gedung = Luas bangunan x HSBGN x 2%

Contoh kasus

SKPD X akan menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor seluas 400 meter persegi, dengan pagar depan sepanjang 15 meter, berapakah anggaran tertinggi yang diperbolehkan?

Jawab:

Perhitungan anggaran maksimal untuk pemeliharaan gedung kantor tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tabel berikut:

	batas maksimal
harga satuan bangunan (Rp per meter persegi)	103.000
Anggaran pemeliharaan gedung 400 meter persegi (Rp)	400 meter persegi x Rp 103.000= <b>Rp 41.200.000</b>
harga satuan pagar-depan (Rp per meter)	39.400
Anggaran pemeliharaan pagar depan 15 meter (Rp)	15 meter x Rp 39.400= <b>Rp 591.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp)</b>	<b>Rp 41.791.000</b>

Berdasarkan tabel di atas bahwa perhitungan anggaran dibagi menjadi dua, yaitu anggaran pemeliharaan gedung dan pagar depan. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa anggaran tertinggi yang dibolehkan adalah sebesar Rp 41,8 juta.

V.5 Penyediaan Makan dan Minum

Deskripsi :

Penyediaan makan minum merupakan kegiatan untuk memperoleh makanan dan minuman yang digunakan sebagai konsumsi dalam rangka mendukung kegiatan rapat ataupun aktivitas-aktivitas satuan kerja lainnya.

Satuan hitung: Rupiah/orang/rapat

**Hasil ASB:**

	68.838,2	55.833	81.843,63
--	----------	--------	-----------

REKAPITULASI BELANJA				
1	Belanja Makanan dan Minuman	0,5	-	1,48
2	Belanja makanan dan minuman rapat	61,7	57,32	66,07
3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	23,8	20,86	26,81
4	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,7	-	1,51
5	Belanja Alat Tulis Kantor	0,0	-	0,06
6	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,1	-	0,40
7	Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Semiloka, Lokakarya dan Sejenisnya	0,0	-	0,13
8	Belanja Makanan dan Minuman Siswa	2,0	0,04	3,94
9	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pasien	3,0	0,61	5,36
10	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga	1,7	0,17	3,13
11	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,0	0,12	1,84
12	Belanja Bahan Makanan	0,9	-	2,05
13	Belanja Penggandaan	0,0	-	0,01
14	Belanja Sosialisasi	0,0	-	0,07
15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,1	-	0,18
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,0	-	0,01
17	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,0	-	0,07
18	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,0	-	0,01
19	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,0	-	0,01
20	Uang Lembur PNS	0,0	-	0,01

### Contoh kasus

Apabila diperkirakan terdapat 12 rapat dalam setahun dengan jumlah peserta 100 orang, berapakah perkiraan anggaran makan dan minum Dinas X, dan berapa pula batas kewajaran anggaran?

**Jawab:**

	Perkiraan Biaya	Perkiraan Biaya	Perkiraan Biaya
<b>Perkiraan Anggaran (Rp)</b>	$\text{Rp } 68.838,2 \times 100 \times 12 =$	$\text{Rp } 55.833 \times 100 \times 12 =$	$\text{Rp } 81.843,63 \times 100 \times 12 =$
	<b>Rp 82.605.823</b>	<b>Rp 66.999.290</b>	<b>Rp 98.212.356</b>

Berdasarkan perhitungan total anggaran pada tabel di atas bahwa perhitungan anggaran makan dan minum yang dibutuhkan Dinas X adalah berkisar antara Rp 67 juta s/d Rp 98 juta.

**V.6 Penyediaan ATK**

Deskripsi :

Penyediaan ATK adalah kegiatan pendukung operasional perkantoran sehari-hari dimana kegiatan ini terdiri dari pembelian alat tulis kantor dan barang-barang lain yang juga mendukung operasional sehari-hari.

Hasil ASB:

Rincian Objek Belanja		Batas Atas dan Batas Bawah Anggaran		
		Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,02	0,00	0,04
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	0,06	0,03	0,09
3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang & Jasa	0,02	0,00	0,05
4	Honorarium Penerima Barang	0,05	0,02	0,07
5	Belanja Alat Tulis Kantor	99,82	99,72	99,92
6	Belanja Perangko, Materai, & Benda Post	0,04	0,00	0,11

Contoh kasus

SKPD X akan mengalokasikan Rp 90.000.000 untuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor, maka tentukan berapa batas atas dan batas bawah anggaran wajar untuk tiap rincian objek belanja?

Jawab

Rincian Objek Belanja		Belanja Anggaran	Nilai Batas	
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	33.498
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	1.500.000	25.041	76.639
3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang & Jasa	-	-	41.125
4	Honorarium Penerima Barang	1.000.000	20.543	62.406
5	Belanja Alat Tulis Kantor	87.500.000	89.752.092	89.930.369
6	Belanja Perangko, Materai, & Benda Pos	-	-	97.656
Total Anggaran		90.000.000		

Berdasarkan tabel perhitungan ASB di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan anggaran SKPD X untuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor sebesar Rp 90 Juta, terdapat 2 jenis rincian obyek belanja yang melewati batas wajar anggaran yaitu honorarium tim pengadaan barang dan jasa dan honorarium penerima barang. Sementara itu anggaran untuk belanja alat tulis kantor sudah dalam batas anggaran yang ditetapkan.

## **VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran. Proses ASB ini di pemerintah daerah dilakukan dalam proses penganggaran yaitu ketika menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Tiap SKPD perlu menghitung setiap biaya pada masing-masing kegiatan dengan dasar alokasi yang berbeda untuk masing-masing kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini melakukan studi perhitungan Analisis Standar Belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005. Studi ini wajib dilaksanakan sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan, akuntabel dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Analisis ASB di Pemerintah Kabupaten Lamongan ini dilakukan dengan menginventarisir data sampel kegiatan pada tahun 2010 sampai 2015 di 37 SKPD. Kegiatan yang dilakukan analisis ASB merupakan kegiatan yang dilaksanakan seluruh atau nyaris seluruh SKPD dimana cenderung kegiatan rutin ataupun kegiatan yang tidak melekat hanya pada SKPD tertentu atau disebut dengan ASB Umum. Berikut adalah jenis ASB Umum yang dilakukan analisis:

1. ASB Pelatihan dan Bimbingan Teknis
2. ASB Pelatihan dan Bimbingan Non Teknis
3. ASB Pembangunan Gedung Kantor
4. ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. ASB Penyediaan Makan dan Minum
6. ASB Penyediaan ATK

Keenam jenis ASB ini menentukan sampel yang digunakan dalam perhitungan dan juga mempengaruhi hasil karena pengolahan batas bawah dan atas menggunakan pendekatan statistika terutama distribusi student-t. Semakin besar jumlah sampel maka semakin baik distribusi dan semakin mendekati distribusi normal secara hipotetis. Jumlah data yang kurang dalam perhitungan menunjukkan bahwa nilai interval ASB memiliki keakuratan yang rendah.

Sementara itu, dalam pengerjaan studi ASB ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi evaluasi dalam penyusunan ASB tahun berikutnya:



- Membakukan cara penghitungan rincian anggaran belanja, misalkan untuk belanja bimbingan teknis harus jelas jumlah orang atau peserta dan jumlah hari pelaksanaannya.
- Mengintegrasikan sistem analisa standar belanja kedalam sistem yang ada misalkan ke sistem penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah.
- Untuk mendapatkan jumlah sampel yang cukup banyak dan signifikan maka manajemen *database* penting. Data-data kegiatan sebaiknya dijaga dari tahun ke tahun karena data yang digunakan adalah *time-series*.
- Beberapa variabel yang akan dijadikan sebagai perhitungan *cost-driver* harus diidentifikasi dan dibuat investarisasi.
- Penggunaan distribusi-t dan regresi secara empiris dapat saling melengkapi. Pilihan untuk menggunakan antara satu dan yang lain tergantung kepada jumlah data yang dimiliki. Apabila jumlah sampel yang dimiliki cukup besar (diatas 10) maka penggunaan regresi dapat dimungkinkan.
- ASB selain dijadikan sebagai pengukuran kewajaran anggaran, indikator lain seperti SSH (standar satuan harga) juga dapat digunakan sebagai pendamping. Oleh karena itu, pemuktahiran indikator SSH harus dilakukan.
- Terakhir, oleh karena anggaran selalu berubah dari tahun ke tahun, maka ASB perlu dilakukan *update* setiap tahun supaya mencerminkan nilai yang sebenarnya dari tahun yang bersangkutan.

## LAMPIRAN

### I. Diklat Teknis

No	Rincian Objek Belanja						
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,0	1,7	-	5,6	0,49	3,60
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,1	0,2	-	0,5	-	0,30
3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,2	0,3	-	0,8	-	0,46
4	Honorarium Penerima Barang	0,1	0,1	-	0,3	-	0,17
5	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	8,3	10,4	-	26,2	-	17,60
8	Honorarium Tenaga Protokol/operator/dokumentasi	0,3	0,4	-	0,8	-	0,67
9	Uang Lembur PNS	1,9	2,3	-	5,3	-	3,95
10	Belanja Alat Tulis Kantor	1,9	3,1	-	9,5	-	4,71
11	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering Dll)	0,1	0,1	-	0,2	-	0,15
12	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,0	0,0	-	0,0	0,00	0,03
13	Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan Praktek Kerja	3,8	4,5	-	11,1	-	7,86
14	Belanja Sertifikasi	4,0	6,1	-	15,0	-	9,46
15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	0,3	0,3	-	0,8	-	0,60
16	Belanja Cetak	3,3	3,0	-	6,9	0,65	6,03
17	Belanja Penggandaan	0,2	0,3	-	1,0	-	0,51
20	Belanja Sewa Meja Kursi	0,2	0,3	-	0,7	-	0,41
21	Belanja Sewa Sound System	0,2	0,2	-	0,5	-	0,37
22	Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Semiloka, Lokakarya dan Sejenisnya	11,6	14,9	-	35,4	-	24,90
23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,4	1,0	-	2,8	-	1,24
24	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,0	11,5	-	28,3	-	19,29
25	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	36,4	41,0	-	95,8	-	73,06
26	Belanja Bimbingan Teknis	13,1	35,2	-	100,0	-	44,51
27	Transportasi dan Akomodasi	1,8	2,9	-	8,0	-	4,39
30	Belanja makanan dan minuman rapat	0,4	1,1	-	3,2	-	1,42
31	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,0	0,1	-	0,2	-	0,07
33	Belanja Jasa Kebersihan	0,2	0,2	-	0,5	-	0,35
34	Belanja Jasa Pengamanan	0,2	0,2	-	0,5	-	0,35
	<b>Rp/ orang/ hari</b>	<b>1.298.317,6</b>	<b>940.798,6</b>	<b>361.111,1</b>	<b>2.500.000,0</b>	<b>457.485</b>	<b>2.139.150,74</b>

## II. Diklat Non Teknis

### I. ASB Dengan Belanja Modal

No	Rincian Objek Belanja						
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,5	6,7	-	42,5	6,1	8,9
2	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	7,5	10,7	-	49,0	5,3	9,8
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,1	0,3	-	1,5	0,1	0,2
4	Belanja Alat Tulis Kantor	5,3	5,6	-	24,7	4,1	6,4
5	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	1,4	2,2	-	12,9	0,9	1,9
6	Belanja Cetak	7,5	14,0	-	69,1	4,5	10,4
7	Belanja Penggandaan	1,6	2,6	-	12,6	1,1	2,2
8	Belanja makanan dan minuman rapat	10,6	9,6	-	39,3	8,6	12,6
9	Belanja Sosialisasi	0,3	1,6	-	12,5	0,0	0,6
10	Transportasi dan Akomodasi	4,1	10,2	-	47,0	1,9	6,2
11	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8,3	13,6	-	42,0	5,5	11,1
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,6	3,6	-	15,5	0,8	2,3
13	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,4	1,9	-	10,1	0,0	0,8
14	Uang Lembur PNS	1,5	3,9	-	19,6	0,6	2,3
15	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	0,1	0,7	-	4,8	0,0	0,2
16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,1	3,7	-	16,8	1,4	2,9
17	Belanja Bimbingan Teknis	5,7	21,5	-	100,0	1,2	10,2
18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	0,0	0,2	-	1,1	0,0	0,1
19	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,0	0,4	-	4,1	0,0	0,1
20	Belanja Sewa Meja Kursi	0,4	2,5	-	24,0	0,0	0,9
21	Belanja Sewa Sound System	0,2	1,0	-	5,5	0,0	0,4
22	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,1	0,3	-	1,8	0,0	0,1
23	Honorarium Penerima Barang	0,0	0,1	-	1,0	0,0	0,0
24	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,0	0,0	-	0,3	0,0	0,0
25	Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan Praktek Kerja	7,1	16,3	-	75,5	3,7	10,5
26	Belanja Sewa Ruang Rapat/pertemuan	1,8	6,8	-	34,3	0,4	3,2
27	Belanja Modal Pengadaaan Printer	0,0	0,3	-	2,8	0,0	0,1
28	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	0,6	3,8	-	34,0	0,0	1,4
29	Honorarium Tenaga Kebersihan	0,0	0,2	-	1,4	0,0	0,1
30	Honorarium Tenaga Pengamanan	0,0	0,0	-	0,2	0,0	0,0

31	Honor Tenaga Protokol/operator/dokumentasi	0,0	0,0	-	0,2	0,0	0,0
32	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	0,0	0,0	-	0,3	0,0	0,0
33	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,0	0,0	-	0,1	0,0	0,0
34	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
35	Belanja Sertifikasi	0,1	0,8	-	4,6	0,0	0,3
36	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,2	1,8	-	17,1	0,0	0,6
37	Belanja Bibit Ternak	0,7	6,8	-	65,0	0,0	2,1
38	Belanja Sewa Peralatan Praktek Las	0,0	0,1	-	1,4	0,0	0,0
39	Belanja Makanan dan Minuman Diklat,Seminar,Semiloka,Lokakarya	1,3	5,1	-	29,4	0,2	2,3
40	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10,0	26,0	-	100,0	4,6	15,4
41	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,4	2,3	-	20,4	0,0	0,8
42	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,0	0,1	-	0,8	0,0	0,0
43	Belanja Peralatan Kerja	0,1	0,8	-	7,2	0,0	0,2
44	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,1	0,8	-	7,3	0,0	0,2
45	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,1	0,2	-	1,2	0,0	0,1
46	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	0,0	0,3	-	3,0	0,0	0,1
47	Belanja Modal Kontruksi Papan Informasi	0,4	3,4	-	32,4	0,0	1,1
48	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Non PNS	0,4	3,8	-	35,8	0,0	1,2
49	Belanja Upah Tenaga Kerja	0,0	0,2	-	1,3	0,0	0,1
50	Belanja Sewa Peralatan Praktek	0,0	0,1	-	0,9	0,0	0,0
51	Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	3,9	16,5	-	75,0	0,5	7,4
52	Belanja Jasa Kebersihan	0,0	0,2	-	2,3	0,0	0,1
53	Belanja Sewa Tempat Penginapan/Hotel	0,3	1,9	-	16,8	0,0	0,6
54	Uang Lembur Non PNS	0,0	0,0	-	0,5	0,0	0,0
55	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,0	0,0	-	0,4	0,0	0,0
56	Belanja Jasa Pengamanan	0,0	0,0	-	0,2	0,0	0,0
57	Belanja jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur	4,1	8,9	-	47,7	2,3	6,0
58	Belanja modal pengadaan komputer/PC	0,1	1,0	-	10,0	0,0	0,3
59	Belanja Pakaian Kostum/Seragam	0,5	5,2	-	50,0	0,0	1,6
60	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,2	2,0	-	18,8	0,0	0,6
61	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,7	6,7	-	63,9	0,0	2,1
	<b>Rp/ orang/ hari</b>	<b>990.735,1</b>	<b>2.140.971,4</b>	<b>7.564,7</b>	<b>13.067.125,0</b>	<b>542.386</b>	<b>1.439.084,26</b>

## II. ASB Tanpa Belanja Modal

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	deviasi standar	min	Max	batas bawah	batas atas
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,5	6,7	-	42,5	6	8,93
2	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	7,6	10,7	-	49,0	5	9,82
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,1	0,3	-	1,5	0	0,19
4	Belanja Alat Tulis Kantor	5,3	5,6	-	24,7	4	6,46
5	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	1,4	2,2	-	12,9	1	1,89
6	Belanja Cetak	7,5	14,0	-	69,1	5	10,41
7	Belanja Penggandaan	1,6	2,6	-	12,6	1	2,18
8	Belanja makanan dan minuman rapat	10,7	9,6	-	39,3	9	12,69
9	Belanja Sosialisasi	0,3	1,6	-	12,5	0	0,65
10	Transportasi dan Akomodasi	4,1	10,2	-	47,0	2	6,19
11	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8,4	13,6	-	42,0	6	11,22
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,6	3,6	-	15,5	1	2,36
13	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,4	1,9	-	10,1	0	0,79
14	Uang Lembur PNS	1,5	3,9	-	19,6	1	2,28
15	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	0,1	0,7	-	4,8	0	0,24
16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,1	3,7	-	16,8	1	2,92
17	Belanja Bimbingan Teknis	5,7	21,5	-	100,0	1	10,21
18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	0,0	0,2	-	1,1	0	0,07
19	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,0	0,4	-	4,1	0	0,13
20	Belanja Sewa Meja Kursi	0,4	2,5	-	24,0	0	0,88
21	Belanja Sewa Sound System	0,2	1,0	-	5,5	0	0,40
22	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,1	0,3	-	1,8	0	0,12
23	Honorarium Penerima Barang	0,0	0,1	-	1,0	0	0,04
24	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,0	0,0	-	0,3	0	0,01
25	Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan Praktek Kerja	7,2	16,3	-	75,5	4	10,58
26	Belanja Sewa Ruang Rapat/pertemuan	1,8	6,8	-	34,5	0	3,26
27	Honorarium Tenaga Kebersihan	0,0	0,2	-	1,8	0	0,08
28	Honorarium Tenaga Pengamanan	0,0	0,0	-	0,2	0	0,01
29	Honor Tenaga Protokol/operator/dokumentasi	0,0	0,0	-	0,2	0	0,01

30	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	0,0	0,0	-	0,3	0	0,02
31	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,0	0,0	-	0,1	0	0,00
32	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,0	0,0	-	0,0	0	0,00
33	Belanja Sertifikasi	0,1	0,8	-	4,6	0	0,30
34	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,2	1,8	-	17,1	0	0,60
35	Belanja Bibit Ternak	0,7	6,8	-	65,0	0	2,14
36	Belanja Sewa Peralatan Praktek Las	0,0	0,1	-	1,4	0	0,05
37	Belanja Makanan dan Minuman Diklat,Seminar,Semiloka,Lokakarya	1,3	5,1	-	29,4	0	2,32
38	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10,0	26,0	-	100,0	5	15,44
39	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,4	2,3	-	20,4	0	0,84
40	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,0	0,1	-	0,8	0	0,03
41	Belanja Peralatan Kerja	0,1	0,8	-	7,2	0	0,24
42	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,1	0,2	-	1,2	0	0,14
43	Belanja Seminar/Semiloka/Lokakarya	0,0	0,3	-	3,0	0	0,10
44	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Non PNS	0,4	3,8	-	35,8	0	1,18
45	Belanja Upah Tenaga Kerja	0,0	0,2	-	1,3	0	0,07
46	Belanja Sewa Peralatan Praktek	0,0	0,1	-	0,9	0	0,03
47	Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	3,9	16,5	-	75,0	0	7,40
48	Belanja Jasa Kebersihan	0,0	0,2	-	2,3	0	0,08
49	Belanja Sewa Tempat Penginapan/Hotel	0,3	1,9	-	17,5	0	0,66
50	Uang Lembur Non PNS	0,0	0,0	-	0,5	0	0,02
51	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,0	0,0	-	0,4	0	0,02
52	Belanja Jasa Pengamanan	0,0	0,0	-	0,2	0	0,01
53	Belanja jasa Narasumber/tenaga ahli/Instruktur	4,2	9,0	-	47,7	2	6,05
54	Belanja Pakaian Kostum/Seragam	0,5	5,2	-	50,0	0	1,65
55	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,2	2,0	-	18,8	0	0,62
56	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,8	7,4	-	71,0	0	2,34
	<b>Rp/ orang/ hari</b>	<b>989.124,8</b>	<b>2.140.494,5</b>	<b>7.564,7</b>	<b>13.067.125,0</b>	<b>540.876</b>	<b>1.437.374,09</b>

### III. Pembangunan Gedung Kantor

No	Objek Belanja	Belanja Bahan	Belanja Jasa	Belanja Lain-lain	Belanja Modal	Belanja Lainnya	Belanja Lainnya
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,2	16,7	-	100,0	1,9	10
2	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,6	1,5	-	8,6	0,2	1
3	Belanja Alat Tulis Kantor	1,9	4,3	-	23,9	0,8	3
4	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan gedung pendidikan	3,2	17,4	-	97,6	0,0	8
5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Kesehatan	3,2	17,4	-	97,2	0,0	8
6	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,2	0,9	-	6,6	0,0	0
7	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	0,6	2,3	-	13,5	0,0	1
8	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	3,5	17,6	-	97,2	0,0	8
9	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3,7	17,8	-	98,1	0,0	8
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,1	4,5	-	30,7	0,0	2
11	Uang Lembur PNS	0,9	5,0	-	35,8	0,0	2
12	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	1,0	5,8	-	43,8	0,0	2
13	Belanja Cetak	0,2	0,6	-	4,5	0,0	0
14	Belanja Penggandaan	0,6	2,1	-	13,1	0,1	1
15	Belanja makanan dan minuman rapat	0,6	2,0	-	13,1	0,1	1
16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	0,0	0,1	-	0,7	0,0	0
17	Transportasi dan Akomodasi	0,0	0,0	-	0,4	0,0	0
18	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	0,0	0,1	-	0,7	0,0	0
19	Belanja modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin	0,3	1,2	-	6,2	0,0	1
20	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	0,0	0,3	-	2,5	0,0	0
21	Belanja modal pengadaan komputer/PC	0,2	1,5	-	12,1	0,0	1
22	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	0,2	1,3	-	10,1	0,0	0
23	Belanja Modal Pengadaaan Printer	0,1	0,7	-	5,7	0,0	0
24	Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer	0,0	0,2	-	1,5	0,0	0
25	Belanja modal pengadaan rak buku/TV/Kembang	0,1	0,7	-	5,3	0,0	0
26	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	0,1	1,1	-	8,6	0,0	0
27	Belanja Modal Pengadaan alat-alat multimedia	0,0	0,3	-	2,5	0,0	0
28	Belanja Modal Pengadaan Roll Meter	1,6	12,8	-	100,0	0,0	5
29	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Diameter	0,0	0,1	-	0,5	0,0	0
30	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Laser Distance Meter	0,1	1,0	-	7,6	0,0	0
31	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,3	19,0	-	92,0	0,0	9
32	Belanja jasa pengumuman	1,6	12,1	-	94,6	0,0	5

	lelang/pemenang lelang						
33	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,0	0,2	-	1,7	0,0	0
34	Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan/Pengawasan	0,0	0,2	-	1,1	0,0	0
35	Belanja Penjilidan	0,0	0,1	-	0,4	0,0	0
36	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,2	1,4	-	11,3	0,0	1
37	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	0,1	0,6	-	4,3	0,0	0
38	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Kantor	37,9	44,4	-	98,2	26,6	49
39	Honorarium Komisi Pemeriksa Pelaksanaan Pekerjaan	1,7	12,7	-	99,4	0,0	5
40	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan lainnya	4,8	21,1	-	100,0	0,0	10
41	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,2	0,5	-	3,5	0,1	0
42	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,0	0,1	-	1,0	0,0	0
43	Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan tempat ibadah	3,2	17,8	-	99,8	0,0	8
44	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,0	0,0	-	0,1	0,0	0
45	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	0,0	0,0	-	0,3	0,0	0
46	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0
47	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,0	0,1	-	0,4	0,0	0
48	Belanja Modal Pengadaan Hammer Tes	0,0	0,0	-	0,1	0,0	0
49	Belanja Modal Pengadaan Caliper Digital	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0
50	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	5,9	20,1	-	95,6	0,7	11
51	Belanja Modal Konstruksi Pagar	4,1	17,7	-	95,7	0,0	9
52	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan taman	1,3	7,3	-	48,4	0,0	3
53	Belanja modal Pengadaan meja rapat	0,0	0,1	-	1,1	0,0	0
54	Belanja Modal Pengadaan Podium	0,0	0,1	-	0,6	0,0	0
55	Belanja modal Pengadaan sound system	0,0	0,2	-	1,9	0,0	0
56	Belanja Upah Tenaga Kerja	0,6	3,0	-	19,5	0,0	1
57	Belanja Modal Pengadaan Almari Kantor	0,0	0,1	-	0,4	0,0	0
58	Belanja modal pengadaan Penghias Ruangan	-	-	-	-	0,0	-
59	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	0,0	0,0	-	0,1	0,0	0
60	Belanja modal Pengadaan meja tamu	0,0	0,0	-	0,3	0,0	0
61	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	0,0	0,0	-	0,3	0,0	0
62	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0
63	Belanja Jasa Instalasi Listrik, Air& Telepon	0,0	0,3	-	2,4	0,0	0
64	Belanja Modal Pengadaan handycam	0,0	0,1	-	0,7	0,0	0
65	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	2,4	9,1	-	34,1	0,1	5
66	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Gedung Kantor	0,1	0,8	-	6,1	0,0	0



harga satuan bangunan (Rp per meter persegi)	4.635.000	5.150.000
harga satuan pagar-depan (Rp per meter)	1.773.000	1.970.000
harga satuan pagar-samping (Rp per meter)	1.566.000	1.740.000

**IV. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

	batas maksimal	HSBGN
harga satuan bangunan (Rp per meter persegi)	103.000	5.150.000
harga satuan pagar-depan (Rp per meter)	39.400	1.970.000
harga satuan pagar-samping (Rp per meter)	34.800	1.740.000

No	Objek Belanja	Belanja Modal	Belanja Investasi	Belanja Rutin/Berkala	Belanja Lainnya	Belanja Lainnya	Belanja Lainnya
1	Belanja Pemeliharaan Gedung	68,6	51,5	-	238,7	55,6	82
2	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	4,5	16,9	-	100,0	0,2	9
3	Belanja Pemeliharaan Taman	1,6	12,5	-	100,0	0,0	5
4	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	0,5	4,3	-	34,5	0,0	2
5	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,2	1,1	-	7,8	0,0	0
6	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	0,0	0,1	-	0,4	0,0	0
7	Uang Lembur PNS	0,2	1,4	-	11,0	0,0	1
8	Uang Lembur Non PNS	0,0	0,1	-	0,8	0,0	0
9	Belanja Bahan Baku Bangunan	23,7	38,2	-	100,0	14,0	33
10	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,1	0,9	-	7,4	0,0	0
11	Belanja Bahan Kimia	0,0	0,2	-	1,3	0,0	0
12	Belanja Jasa Pembayaran PBB	0,0	0,2	-	1,6	0,0	0
13	Belanja Upah Tenaga Kerja	2,6	8,1	-	40,9	0,5	5
14	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,0	0,0	-	0,2	0,0	0
15	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,0	0,1	-	0,5	0,0	0
16	Belanja Alat Tulis Kantor	0,1	0,3	-	2,0	0,0	0
17	Belanja Penggandaan	0,0	0,2	-	0,8	0,0	0
18	Belanja Modal Pengadaan Korden	0,3	2,1	-	16,6	0,0	1


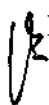
**V. Penyediaan Makan dan Minum**

No	Rincian Objek Belanja	Belanja Modal	Belanja Investasi	Belanja Rutin/Berkala	Belanja Lainnya	Belanja Lainnya	Belanja Lainnya
1	Belanja Makanan dan Minuman	0,5	7,1	-	100,0	0	1
2	Belanja makanan dan minuman rapat	61,7	31,4	-	100,0	57	66
3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	23,8	21,3	-	97,1	21	27
4	Belanja Makanan dan Minuman Harian	0,7	5,8	-	59,1	0	2

	Pegawai						
5	Belanja Alat Tulis Kantor	0,0	0,2	-	3,1	0	0
8	Belanja Makanan dan Minuman Siswa	2,0	14,0	-	100,0	0	4
9	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pasien	3,0	17,1	-	100,0	1	5
10	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Jaga	1,7	10,6	-	88,5	0	3
11	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,0	6,2	-	45,8	0	2
12	Belanja Bahan Makanan	0,9	8,6	-	89,9	0	2
13	Belanja Penggandaan	0,0	0,0	-	0,4	0	0
14	Belanja Sosialisasi	0,0	0,3	-	4,3	0	0
15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,1	0,8	-	11,9	0	0
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,0	0,1	-	0,9	0	0
17	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,0	0,2	-	2,5	0	0
18	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,0	0,0	-	0,5	0	0
19	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,0	0,0	-	0,3	0	0
20	Uang Lembur PNS	0,0	0,1	-	0,6	0	0
	<b>Rp/ orang/ hari</b>	<b>68.838,2</b>	<b>93.273,0</b>	<b>3.148,1</b>	<b>416.666,7</b>	<b>55.833</b>	<b>81.843,63</b>

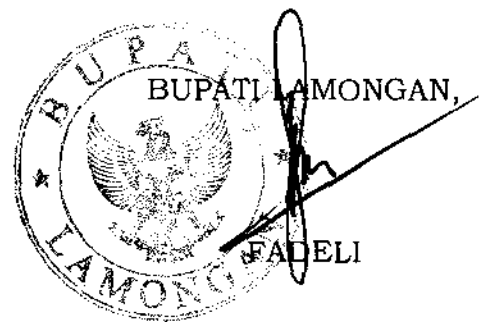
VI. Penyediaan Alat Tulis Kantor

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	deviasi standar	min	Max	batas bawah	batas atas
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,02	0,15	-	1,47	-	0,04
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	0,06	0,20	-	1,32	0,03	0,09
3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang & Jasa	0,02	0,16	-	1,50	-	0,05
4	Honorarium Penerima Barang	0,05	0,16	-	0,99	0,02	0,07
5	Belanja Alat Tulis Kantor	99,82	0,68	93,33	100,00	99,72	99,92
6	Belanja Perangko, Materai, & Benda Post	0,04	0,49	-	6,67	-	0,11

BUPATI LAMONGAN,   
FADELI 

VI. Penyediaan Alat Tulis Kantor

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	deviasi standar	min	Max	batas bawah	batas atas
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,02	0,15	-	1,47	-	0,04
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	0,06	0,20	-	1,32	0,03	0,09
3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang & Jasa	0,02	0,16	-	1,50	-	0,05
4	Honorarium Penerima Barang	0,05	0,16	-	0,99	0,02	0,07
5	Belanja Alat Tulis Kantor	99,82	0,68	93,33	100,00	99,72	99,92
6	Belanja Perangko, Materai, & Benda Post	0,04	0,49	-	6,67	-	0,11

BUPATI LAMONGAN,  
FADELI